

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdurrahman, M. (2009). *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Pres.
- Adisasmita, R. (2010). *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Makasar: PPKED.
- Ali, F. (2015). *Teori dan Konsep Administrasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bastian. (2015). *Akuntansi untuk Kecamatan & Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Dewanti, E. D. (2015). *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreang (Studi Kasus Pada Desa Boreang Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)*. Jember: Universitas Jember.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*.
- Ginjar, A. (2021). *Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Di Desa Marapah Kabupaten Ciamis*. Bandung: UIN Gunung Djati.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Wijaya Grand Center.
- Hasan, M. (2002). *Pokok Pokok Manteri Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia .
- HAW, W. (2012). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan utuh*. Jakarta: Rajawali Pers.
- HR, R. (2017). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Huda, N. (2015). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Kurnia. (2015). *Pengawasan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: “Sosialisasi Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tentang Desa*. Jakarta: BPKP.
- Mardiasmo. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Moeleong, L. J. (2002). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Novianto, D. (2019). *Peraturan Pemerintah Tentang Dana Desa*. Pontianak: CV Derwati Press.
- Nurani, M. F. (2018). *Pembayaran Gaji PNS Telaah Perjanjian Kerjasama Kemenag dan BRI*. Banjarmasin: Gramedia.
- Nursinta, E. (2019). *Pengelolaan Administrasi Desa*. Yogyakarta: Desa Pustaka Indonesia.
- Oktara, L. P. (2019). *Bijak Mengelola Dana Desa*. Yogyakarta: Desa Pustaka Indonesia.
- Pratiwi, S. p. (2019). *Analisis Penerapan Peraturan Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Penata Usahaan, Pelaporan, dan Pertanggung Jawaban APBDes*”. Surakarta : Universitas Muhamadiyah Surakarta.
- Rifqi, A. (2017). *Manajemen Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka.
- Rizki, Y. (2021). *Analisis pengelolaan Keuangan di Desa Tumpang Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahnun 2018*. Malang: Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim .

- Saidi, M. D., & Djafar, E. M. (2018). *Hukum Keuangan Negara*. Depok: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumpeno, W. (2011). *Perencanaan desa terpadu edisi kedua*. Jakarta: Read Indonesia.
- Trisnanti, M. (2013). Studi Mengenai Implementasi Kebijakan Program Layanan Referensi di Perpustakaan Universitas Surabaya. *Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan Universitas Airlangga*, 3-5.
- Wiratna, V. (2015). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

## **B. Jurnal**

- Abdussakur. (2012). Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Wilayah Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, I, 4.
- Deswimar, D. (2014). Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Pedesaan. *Jurnal El-Riyasah*, V.
- Faturrahman, F., & dkk. (2020). Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa Terhadap Pencegahan Covid-19 Di Kecamatan Moyo Hulu. *Jurnal Tambora*, IV, 33.
- Hasrul, M. (2019). Kedudukan dan Tugas Staf Ahli dalam Struktur Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum Amnna Gappa*, XXVII, 23-28.

- Johnetha Lafani Supit, d. (2017). Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Lowian Kecamatan Maesan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, XXII, 4.
- Rumegang, G. (2021). Efektivitas Musrembang Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastuktur di Desa Ambia Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Talaud. *Jurnal Governance*, 2, 04.
- Runa, I. W. (2006). Pengertian Desa (Nyata, Fiktif) Yang Mempengaruhi Pola Pikir Masyarakat Dalam Pengungkapan Sistem Desa Teng. *Jurnal Teknik*, 07, 4.
- Wulandari, A. S., & Ilyas, A. (2019). Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia. *Jurnal Gema Keadilan*, VI, 291.

### **C.Peraturan Perundang-Undangan**

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.*  
(n.d.).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.*  
(n.d.).
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022 .* (n.d.).

*Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.*

(n.d.).

*Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana*

*Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.*

(n.d.).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan

Desa. (n.d.).